

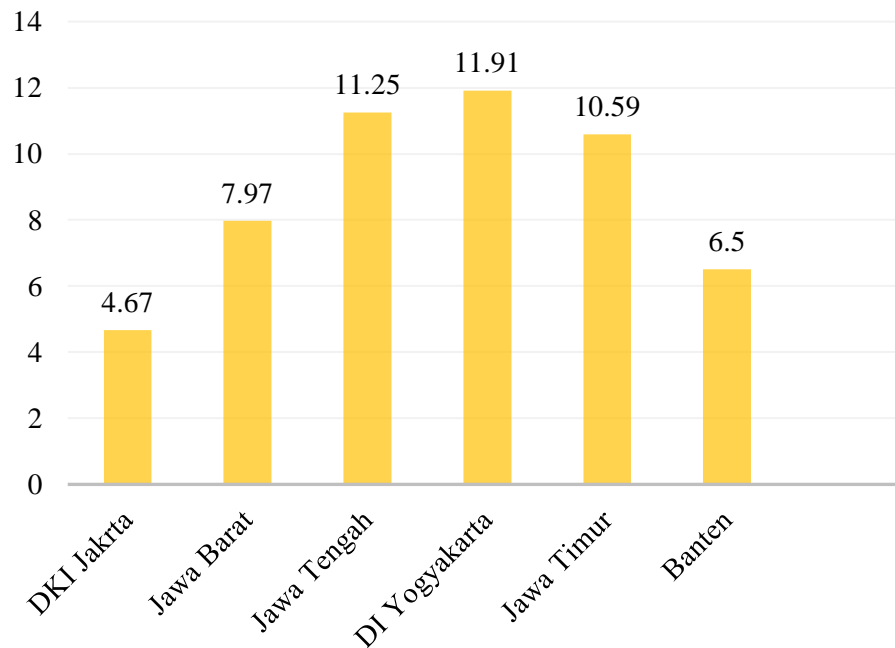
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi jangka panjang yang sulit diatasi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan menjadi masalah multidimensi yang dihadapi berbagai daerah di tanah air yang perlu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Todaro & Smith (2006) menjelaskan bahwa kemiskinan muncul karena adanya sejumlah penduduk yang tidak mampu untuk memperoleh sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kondisi ini merupakan penyebab dari turunnya kualitas sumber daya manusia yang mengakibatkan pada penurunan produktivitas dan pendapatan, sehingga masyarakat akan tidak sejahtera. Kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu tetapi juga menimbulkan hambatan kepada pembangunan di masa depan (Nurkse, dalam Sukirno 1985).

Indonesia memiliki 38 provinsi yang salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak urutan pertama di Indonesia yang tentu saja memiliki berbagai macam permasalahan sosial ekonomi salah satunya kemiskinan. Berdasarkan gambar 1.1 tentang tingkat kemiskinan menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2021 terlihat bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Barat menduduki posisi ke 4 termiskin di antara provinsi lainnya di Pulau Jawa, sedangkan persentase kemiskinan paling rendah diduduki oleh DKI Jakarta.



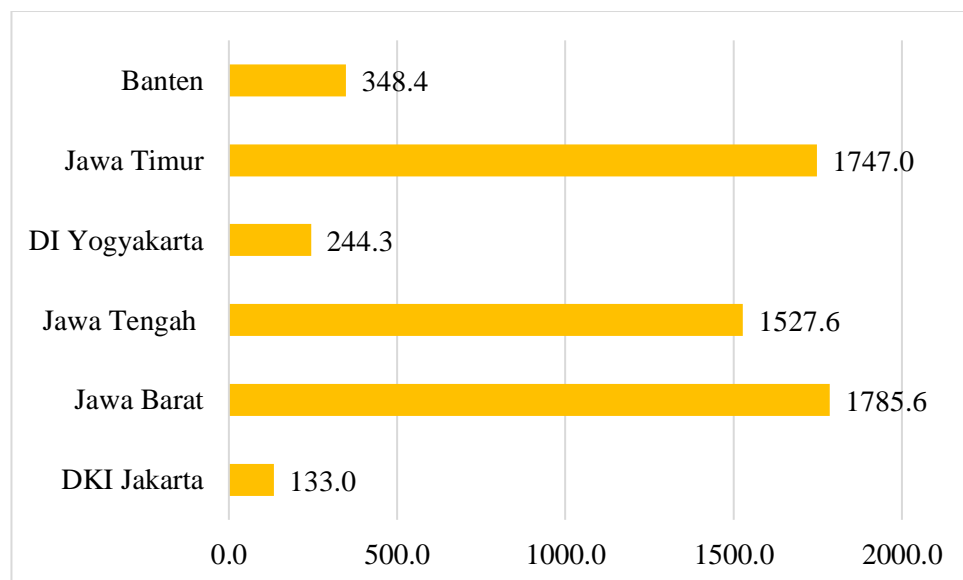
Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Menurut Provinsi Tahun 2021 (dalam %)

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat (diolah)

Penduduk miskin ekstrem merupakan penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan internasional sebesar 2,15 USD/hari. Gambar 1.2 memperlihatkan tingkat kemiskinan ekstrem di Pulau Jawa pada Maret tahun 2021. Tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 1.785,6 ribu jiwa, disusul oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.747 ribu jiwa sedangkan Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 1.527,6 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah memiliki gap yang sangat jauh dengan tiga provinsi lainnya di Pulau Jawa. DKI Jakarta sendiri memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem hanya

sebanyak 133 ribu jiwa, jumlah ini merupakan yang terkecil dari keenam provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Provinsi Jawa Barat menduduki posisi tertinggi dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di Pulau Jawa pada tahun 2021. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu sasaran yang diprioritaskan untuk pengentasan masalah kemiskinan ekstrem. Di sisi lain Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk yang banyak serta merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Indonesia. Namun tiga dari enam provinsi yang ada di Pulau Jawa ternyata menjadi fokus pemerintah untuk diprioritaskan menjadi daerah pengentasan kemiskinan ekstrem. Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur juga termasuk ke dalam sasaran tersebut dari ketujuh provinsi yang dijadikan sasaran.



Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem di Pulau Jawa pada Maret Tahun 2021 (dalam ribu jiwa)

Sumber: The National Team for the Acceleration of Poverty Reduction TNP2K (diolah)

Dengan demikian pembahasan tentang sebab-sebab kemiskinan atau variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan akan sangat

menarik untuk dibahas dan dikaji. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Sa'roni (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa secara parsial tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan *p-value* sebesar 0,0002 lebih kecil dari 0,05. Penelitian yang dilakukan oleh Basyah & Mustofa (2022) juga menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Kota Sibolga. Penelitian lainnya dilakukan oleh Jacobus, Engka, & Kawuang (2022) yang menghasilkan penelitian bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dari tinjauan empiris yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, penelitian yang melibatkan perilaku sosial sering kali memperoleh hasil yang berbeda pada tempat, waktu dan sasaran penelitian yang berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Semmalia & Aminuddin (2021) yang menghasilkan kesimpulan penelitian bahwa di Kota Sibolga tingkat pengangguran berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka tingkat kemiskinan akan berkurang. Penelitian lainnya dilakukan Amins D.B., (2017) yang menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Berau dengan tahun penelitian tahun 2009-2014. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan penelitian di Provinsi Jawa Barat dengan tahun penelitian 2017-2022 untuk membuktikan hubungan tingkat pengangguran dengan tingkat kemiskinan.

Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan sistem bantuan langsung tunai. Negara lain yang juga menerapkan sistem bantuan langsung tunai adalah negara Brazil. Upaya bantuan langsung tunai, bantuan non tunai, pemberdayaan sumber daya manusia, jaminan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur untuk memudahkan mobilitas pengusaha telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dalam laporan keuangan anggaran APBD setiap kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat terdapat anggaran belanja bantuan keuangan dan anggaran belanja bantuan sosial. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa. Bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota diperuntukkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. Kemudian pada tahun 2015 pemerintah daerah mengeluarkan peraturan kembali tentang pemberian bantuan keuangan dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa, bahwa bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan partai politik.

Selain itu dalam APBD kabupaten/kota terdapat anggaran belanja bantuan sosial. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 poin 20 Tahun 2021, menjelaskan bahwa anggaran bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat. Berdasarkan kajian literasi yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan berdasarkan topik yang berkaitan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Handa, Hoop, dan Palermu (2017) yang menghasilkan kesimpulan dalam penelitiannya bahwa bantuan tunai memiliki pengaruh terhadap kerawanan pangan terhadap masyarakat Zambia. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan langsung tunai memberikan pengaruh sederhana terhadap tingkat kemiskinan. Hasil yang serupa diperoleh oleh Martinez, Ayala & Huerta (2001) dalam penelitiannya yang menghasilkan kesimpulan bahwa di beberapa negara OECD dengan program bantuan langsung tunai, bantuan langsung tunai mempunyai pengaruh jangka pendek dalam mengurangi kemiskinan. Negara-negara yang termasuk ke dalam organisasi kerja sama OECD diantaranya adalah Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, dan Yunani. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Habimana, Haughton J., Nkuruziza & Haughton D. (2021) juga menghasilkan kesimpulan yang sama dalam penelitiannya bahwa program transfer tunai di Rwanda tidak meningkatkan konsumsi yang besar sehingga hanya memiliki pengaruh yang sederhana dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Rarun C.C.H., Kawung G.M.V. & Niode A.O (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian lainnya dilakukan oleh Sumiyarti (2022) yang menghasilkan kesimpulan bahwa belanja modal dan belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena tinjauan empiris yang telah dilakukan penulis

berusaha membuktikan bagaimana efek realisasi dana penanggulangan kemiskinan yang dilihat dari realisasi dana bantuan sosial dan realisasi dana bantuan keuangan bagi masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Variabel lainnya yang diduga berpengaruh terhadap kemiskinan adalah kepadatan penduduk. Kelebihan penduduk (*over population*) akan memicu terjadinya kelangkaan sumber daya pada wilayah tersebut misalnya kelangkaan lahan, lahan yang seharusnya digunakan untuk lahan pertanian atau industri akan menjadi langka sehingga lahan produktif akan berkurang karena sebagian besar lahan dari wilayah tersebut digunakan sebagai lahan hunian. sehingga pada akhirnya akan terjadi ketimpangan antara *supply* dan *deman* tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang lebih tinggi dari pada jumlah lapangan kerja yang membutuhkan akan membuat penduduk di suatu wilayah mengalami penurunan pendapatan. Pada akhirnya keadaan seperti ini yang secara terus menerus terjadi akan membuat masyarakat berkekurangan dan menjadi miskin. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita C. & Legowo M. (2022) yang menghasilkan kesimpulan bahwa kepadatan penduduk memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan tahun pengamatan 2011-2022. Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nyompa S., Maru R., & Amal (2019) yang menghasilkan kesimpulan bahwa jumlah penduduk yang terus meningkat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar dengan tahun penelitian 2014-2018. Namun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Fauzi R. N., Febrian R. K., & Desmawan D. (2022) memiliki kesimpulan yang berbeda, hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa laju pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan waktu penelitian pada tahun 2021.

Penulis menemukan beberapa kajian empiris yang relevan dengan penelitian ini. Terjadi inkonsisten antara satu penelitian dengan penelitian lainnya, terdapat hasil penelitian yang sesuai dengan teori, namun ada pula penelitian yang hasilnya paradoks. Terdapat pula penelitian yang menganalisis kebijakan yang menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan yang dilakukan belum memberikan manfaat yang besar terhadap sasaran kebijakan.

Oleh karena itu penulis menjadikan perbedaan-perbedaan hasil penelitian tersebut sebagai celah penelitian (*research gap*). Jenis dari celah penelitian yang ditemukan adalah jenis *empirical gap*. *Empirical gap* adalah celah penelitian yang merujuk pada kesenjangan hasil penelitian dimana hasil penelitian menunjukkan inkonsisten antara penelitian satu dengan lainnya. Selain itu penulis mengidentifikasi bahwa variabel dana penanggulangan kemiskinan daerah merupakan variabel yang belum banyak diteliti kaitannya dengan kemiskinan khususnya di Provinsi Jawa Barat. Sehingga variabel ini menjadi penting untuk diteliti.

Dari fenomena dan beberapa studi empiris yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk menganalisis kemiskinan pada salah satu provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Barat dengan periode waktu penelitian tahun 2017-2022. Penelitian ini akan membahas tentang analisis variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, dengan metode data panel sehingga akan lebih banyak memberikan informasi karena data yang digunakan adalah data runtut waktu dan *cross section*

oleh karena itu informasi yang didapatkan akan lebih lengkap. Proses regresi juga menggunakan teknik *pooled* data sehingga semakin lengkap informasi yang akan didapatkan. Penelitian ini akhirnya akan menghasilkan sebuah simpulan apakah variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh yang sesuai dengan teori dan studi empiris yang sudah ada. Dengan demikian penelitian ini berjudul **“Pengaruh Tingkat pengangguran, Dana Penanggulangan Kemiskinan, dan Kepadatan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022”**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan sebagai tujuan penelitian sehingga memperoleh pengetahuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada pada latar belakang penelitian, maka disusun rumusan masalah yang perlu dijawab dalam bab pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi tingkat pengangguran, dana penanggulangan kemiskinan, kepadatan penduduk, dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dalam enam tahun terakhir tahun 2017-2022?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran, dana penanggulangan kemiskinan, dan kepadatan penduduk secara parsial terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat dengan periode pengamatan tahun 2017-2022?

3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran, dana penanggulangan kemiskinan dan kepadatan penduduk secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dengan periode waktu pengamatan 2017-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi tingkat pengangguran, dana penanggulangan kemiskinan, kepadatan penduduk, dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dalam enam tahun terakhir dari tahun 2017-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran, dana penanggulangan kemiskinan, dan kepadatan penduduk secara parsial terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat dengan periode pengamatan tahun 2017-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran, dana penanggulangan kemiskinan dan kepadatan penduduk secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat dengan periode pengamatan tahun 2017-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik manfaat teoritis maupun praktis, oleh karena itu penulis menguraikan kegunaan penelitian ini yang di bagi

menjadi dua bagian baik manfaat secara teoritis maupun manfaatnya secara praktis sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan akademik. Sebuah penelitian yang baik harusnya memberikan pengetahuan baru untuk diketahui pembaca sehingga dapat dijadikan pembelajaran dan temuan celah penelitian yang baru pada penelitian-penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini manfaat teoritis diuraikan sebagai berikut:

1. Dengan dilakukannya penelitian ini maka akan memperkuat teori yang sudah ada.
2. Hasil penelitian akan membuktikan apakah teori-teori yang digunakan sebagai bahan acuan penelitian ini terbukti kebenarannya.
3. Hasil penelitian akan menjadi sebuah pengetahuan baru yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat langsung dari sebuah penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini diuraikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat mengetahui lebih jauh tentang kondisi kemiskinan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi program studi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi penelitian atau kajian selanjutnya mahasiswa ekonomi pembangunan untuk mengkaji lebih jauh hal-hal yang belum terbahas dalam penelitian ini.
3. Bagi pemerintah, penelitian dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan perihal kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Bagian lokasi penelitian menjelaskan tentang, sasaran penelitian yang akan diambil datanya untuk dilakukan pengujian dan dianalisis, sehingga menjadi kesimpulan dalam penelitian. Selanjutnya jadwal penelitian adalah bagian yang menjelaskan histori waktu tahap-tahap pembuatan penelitian ini.

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data sekunder. Data diperoleh dari laporan dan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) dan Open Data Jabar. Data yang digunakan adalah data tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dana penanggulangan kemiskinan, dan data kepadatan penduduk yang diukur dari data persentase tingkat kemiskinan, persentase tingkat pengangguran, persentase realisasi anggaran dana belanja bantuan sosial dana bantuan keuangan, serta persentase kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022.

